

Cegah Korupsi, Semua Transaksi Nontunai

GUBERNURAN — Gubernur Jateng Ganjar Pranowo akan menerapkan sistem *non cash transactions* (NTC) atau tidak melakukan sistem pembayaran secara tunai dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Jateng. Semua transaksi dengan rekanan akan dilakukan nontunai menggunakan

jasa perbankan atau dengan cara ditransfer lewat bank. Hal ini untuk memudahkan pengawasan penggunaan keuangan negara dan mengantisipasi tindak pidana korupsi.

"Kami akan menerapkan cara ini guna untuk mencegah terjadinya korupsi di dalam

► Baca **Cegah ...** hal 11



TRANSPARANSI — Gubernur Ganjar Pranowo dan Ketua BPK RI Hadi Poernomo saat bertemu kemarin.

■ CEGAH

Sambungan dari hal. 1

proyek pengadaan barang dan jasa. Cara ini juga akan kita sampaikan ke pemkab dan pemkot se-Jateng agar juga ikut menerapkannya," kata Ganjar Pranowo usai melakukan pertemuan dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Hadi Poernomo di ruang kerjanya, Jumat siang (13/9).

Pertemuan itu juga dihadiri oleh Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sri Puryono, pimpinan instansi vertikal Jateng, serta para pejabat di lingkungan BPK RI.

Ganjar mengatakan, hasil audit BPK RI terhadap keuangan Pemprov Jateng memang bagus. Terbukti, pada tahun ini, Pemprov Jateng kembali memperoleh predikat WTP atau wajar tanpa pengecualian. Namun, menurut BPK, predikat WTP belum menjamin Jateng sudah

bebas dari korupsi.

Setelah sukses meraih WTP, lanjut Ganjar, Jateng ingin memperoleh WTP dengan tidak korupsi, dan salah satu caranya dengan tidak melakukan transaksi menggunakan uang tunai atau langsung di dalam setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemprov.

"Ini akan berlaku untuk proyek baru yang akan terjadi setelah ini. Untuk proyek yang lama, dan sudah berjalan tidak menggunakan cara ini. Nanti malah mencurigai saya yang bukan-bukan. Pak Ganjar *ki senengane* mencari-cari. Biarkan yang kemarin berjalan seperti kemarin, yang proyek baru kita terapkan cara ini," terangnya.

Menurut Ganjar, kebijakan ini diambil setelah pihaknya mendapatkan penawaran dari BPK RI. Tanpa pikir panjang, pihaknya langsung menyetujui. Dan Pemprov Jateng menjadi provinsi kelima yang akan

menerapkan cara ini, setelah DKI Jakarta, Jatim, Jabar dan Banten.

"Mudah-mudahan nanti, cara ini akan dilakukan secara nasional. Kalaupun tidak, setidaknya Jateng dan beberapa provinsi lain sudah menggunakannya," katanya.

Apakah akan menggunakan Pergub (peraturan gubernur) sebagai landasan penggunaan cara ini? Menurut Ganjar, pihaknya tidak akan mengeluarkan Pergub. "Kita sampaikan secara lisan seperti ini. Jika ada yang menolak ya kita akan ajak berbicara, berdialog. Mengapa tidak mau menggunakan cara ini," ucapnya.

Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan, pihaknya memang menawari Gubernur Jateng untuk menerapkan cara ini. Tanpa lama berpikir, gubernur langsung menyatakan akan menerapkan cara NTC tersebut di Jateng.

"Sejauh ini baru lima provinsi

yang sepakat dengan cara ini. Minggu depan Provinsi DI Jogjakarta, beberapa BUMN dan Kementerian. Pertama kali yang setuju adalah Pemprov DKI pekan kemarin," kata Hadi.

Dia mengatakan, dengan menggunakan cara ini, Pemprov Jateng bisa menekan peluang terjadinya korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Jateng. Selain itu juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Karena transaksi ini dapat di-*trace*, ditelusuri, di-*tracking* secara mudah dan terdokumentasi.

"Nantinya, setiap pihak ketiga (rekanan) yang memenangkan lelang bertransaksi kepada pihak keempat, maka pembayarannya harus dilakukan dengan cara ditransfer melalui rekening bank. Untuk nama banknya bebas. Kita tidak boleh mengarahkan bank yang dipakai," ucapnya.

(saf/jpnn/aro/ce1)